

ABSTRAK

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah gagal melakukan reformasi sektor keamanan di Timor Leste. Kegagalan ini mengakibatkan konflik kekerasan antara polisi dan tentara tahun 2006-2008, ketidakprofesionalan institusi keamanan negara, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi keamanan negara. Namun di saat yang bersamaan justru masyarakat merasakan keamanan lingkungannya yang semakin membaik dan kepercayaan yang tinggi terhadap institusi informal sebagai rujukan keamanan. Penelitian-penelitian sebelumnya telah mampu menjelaskan kegagalan PBB di Timor Leste dengan melakukan kritik terhadap pendekatan liberal dalam studi keamanan. Kritik serupa dilakukan dalam penelitian ini namun dengan menggunakan pendekatan institusionalisme tentang relasi institusi informal dengan formal dalam pembentukan institusi keamanan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran institusi keamanan informal (veteran Falintil, *uma lisan*, dan gereja) dalam sektor keamanan di Timor Leste dan relasinya dengan institusi keamanan negara. Penelitian ini menggunakan metode *explanatory sequential* dengan data primer yang berasal dari wawancara, kuesioner, observasi di Dili dan Ermera maupun sekunder yang berasal dari penelitian-penelitian sebelumnya. Temuan dalam penelitian ini adalah peran veteran Falintil sebagai institusi *toxic* yang berfungsi memperlemah institusi keamanan negara dengan cara nepotisme dan *clientelism*. Gereja dan *uma lisan* berperan sebagai institusi *tonic* yang berfungsi memperkuat institusi keamanan negara dengan cara memberikan rasa aman pada ranah kognisi dan mekanisme penyelesaian masalah di luar peradilan negara. Temuan ini merekomendasikan pentingnya keberadaan bersama antara institusi liberal dan tradisional dalam menunjang keberhasilan misi reformasi sektor keamanan PBB di negara pasca konflik.

Kata kunci: Perserikatan Bangsa-Bangsa, reformasi sektor keamanan, institusi informal, *uma lisan*, falintil, gereja, *toxic institution*, *tonic institution*.

ABSTRACT

The United Nations has failed to carry out security sector reform in Timor Leste. This failure has resulted in a violent conflict between the police and the army in 2006-2008, unprofessional state security institutions, and low public trust in state security institutions. However, at the same time, the people feel the security of their environment which is getting better and high trust in informal institutions as a security reference. Previous studies have been able to explain the failure of the UN in Timor Leste by criticizing the liberal approach in security studies. Similar criticism was carried out in this study but by using an institutionalism approach regarding the relationship of informal and formal institutions in the formation of state security institutions. This study aims to determine how the role of informal security institutions (Falintil veterans, *uma lisan*, and churches) in the security sector in Timor Leste and its relationship with state security institutions. This research has used explanatory sequential methods with primary data derived from interviews, questionnaires, observations in Dili and Ermera as well as secondary ones from previous studies. This research has found the role of Falintil veterans as a toxic institution whose function is to weaken state security institutions by nepotism and clientelism. While the role of the church and *uma lisan* are as tonic institutions that strengthen the state security institutions by providing security in the realm of cognition and problem-solving mechanisms outside the state court. This finding recommends to the United Nations and the government of Timor Leste to strengthen the role of informal tonic institutions and place them in coexistence relations with the state security institutions.

Keywords: United Nations, security sector reform, informal institutions, *uma lisan*, falintil, church, toxic institution, tonic institution.